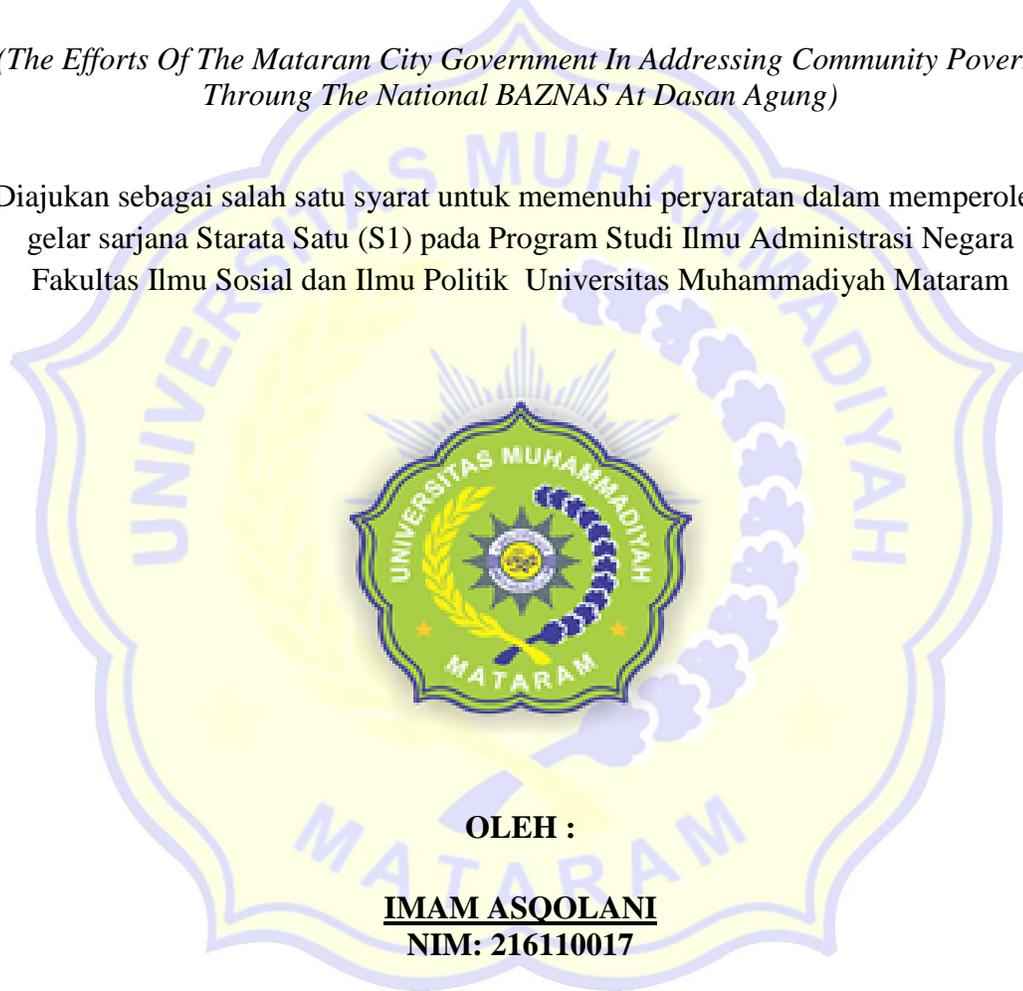


SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM PENANGANAN
KEMISKINAN MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA BAZNAS DI
KELURAHAN DASAN AGUNG**

*(The Efforts Of The Mataram City Government In Addressing Community Poverty
Throung The National BAZNAS At Dasan Agung)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Starata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

IMAM ASQOLANI

NIM: 216110017

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020**

**HALAMAN
PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini disetujui oleh pembimbing untuk di ujikan ke Panitia Ujian Skripsi
Program Studi Administrasi Publik pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Agustus 2020

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Drs. Mintasrihardi, MH)
NIDN. 0530016101



(M. Taufik Rachaman, SH, MH)
NIDN. 0825018701

Mengetahui,
Program Studi Administasi Publik
Ketua



(Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)
NIDN. 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM PENANGANAN
KEMISKINAN MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA BAZNAS DI
KELURAHAN DASAN AGUNG**

Oleh :

IMAM ASOOLANI

NIM. 216110017

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini.
Mataram, 19 Agustus 2020
Tim Penguji**

1. **Drs. Mintasrihardi**
NIDN. 0830016101

()

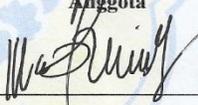
Ketua

1. **M. Taufik Rachman, SH.,MH**
NIDN. 0825078701

()

Anggota

2. **Mardiah, S.Sos., M.Si**
NIDN. 0804117201

()

Anggota

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



(Dr. N. Muhammad Ali, M.Si)

NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM ASQOLANI

NIM : 216110017

Dengan menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan lain).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, Agustus 2020



IMAM ASQOLANI
NIM. 216110017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM ASQOLANI
NIM : 216110017
Tempat/Tgl Lahir : Dasan Agung / 25 - 09 - 1998
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 085 208 206 284
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Upaya Pemerintah Kota Mataram dalam Penguatan Kepercayaan Masyarakat Melalui Lembaga BAZNAS di Kecamatan Dasan Agung

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 07 - 09 - 2020

Penulis


IMAM ASQOLANI
NIM. 216110017

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Semakin Kuat Dirimu, Semakin Banyak Yang Ingin Melemahkan mu.
Semakin Besar Dirimu, Semakin Banyak Yang Ingin Mengerdilkan mu.
Semakin Bebas Dirimu, Semakin Banyak Yang Ingin Mengekang mu.
Semakin Kau Menjadi Dirimu, Semakin Banyak Yang Ingin Menjadi Dirimu.

Sukses Merupakan Balas Dendam Terbaik. Never Give Up!

(Imam Asqolani /Penulis)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuasaya Bapak Samsulhadi dan Malaikat tak bersayap mamaku tercinta Anita supiana yang selalu memberikan do'a, dukungan dan menjadi penyemangat terhebat selama penyusunan skripsi ini.
2. Adik saya, Watsiqo Dita Bilmilla yang telah mensupport saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Terimakasih kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan menghibur disaat lelah dengan dunia skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Angkatan 2016, terimakasih untuk semangat, pengalaman berharga dan kesan yang sudah kita hadapi bersama.
5. Alamamater tercita Universitas Muhammadiyah Mataram tempat saya menimba ilmu sejak tahun 2016 - 2020.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Pemerintah Kota Mataram Dalam penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Melalui Lembaga BAZNAS Di kelurahan Dasan Agung”** dengan lancar dan tepat waktu.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penyusun ingin sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Mintasrihardi, S.M, selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Bapak M. Taufik Rachman S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, *support*, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Mardiah, S. Sos, M.Si, sebagai penguji Netral.

7. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Samsul Hadi dan Ibu Anita Supiana. Terima kasih untuk segalanya. Semoga Tuhan Meridhoi apa yang telah bapak – ibu lakukan dan perjuangkan untuk saya.

8. Untuk adik saya, watsiqo Dita Bimilla. Terima kasih telah memberikan semangat yang tiada hentinya

9. Untuk Rena Maulidiana dan Lalu Muhammad Farozi yang telah membantu dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi saya

10. Semua teman-teman Administrasi Publik angkatan 2016 atas kerja samanya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan Ilmu Sosial dan Politik.

Mataram, Agustus 2020

IMAM ASQOLANI

**UPAYA PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA BAZNAS DI
KELURAHAN DASAN AGUNG**

OLEH :

IMAM ASQOLANI

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram

Skripsi, September 2020

Email : imamasqolani10@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Dasan Agung, Pemerintah Kota Mataram merealisasikan peminjaman modal kepada masyarakat Dasan Agung yang ingin memiliki usaha sebagai mata pencarian mereka, dengan usaha tersebut masyarakat Dasan Agung dapat meningkatkan perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Mataram dalam menangani masalah kemiskinan di Kelurahan Dasan Agung dan juga untuk menganalisis factor penghambat kemiskinan di kelurahan Dasan Agung. Adapun metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Mataram dalam penanganan kemiskinan masyarakat di kelurahan Dasan Agung telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pedagang kecil hingga menengah. Kegiatan BAZNAS harus mengadakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan masyarakat kelurahan Dasan

Agung khususnya kelompok sasaran sehingga masyarakat bisa memahami proses peminjaman modal usaha dari BAZNAS.

Kata Kunci: *Kemiskinan, BAZNAS, dan Pemerintah Daerah*

**GOVERNMENT EFFORTS IN MANAGING POVERTY OF COMMUNITY
THROUGH THE BAZNAS INSTITUTION IN DASAN AGUNG VILLAGE,
MATARAM CITY**

IMAM ASQOLANI

**Public Administration Program
Faculty of Social and Political Science
Muhammadiyah University of Mataram**

ABSTRACT

In order to improve the community welfare of Dasan Agung, the Government of Mataram City distributes the capital loans to people of Dasan Agung who want to have business as their livelihood. With this effort, they can improve economic income. This study intends to examine an attempt of the government in Mataram City dealing with poverty problems in Dasan Agung Village, also to discuss the obstacles factors of poverty in Dasan Agung Village. The method used is descriptive qualitative; the data collection techniques were obtained through observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, it shows that the government efforts in handling community poverty in Dasan Agung Village have an impact on increasing the community welfare, especially small to medium traders. BAZNAS activities must provide training to improve the capacity of the people of Dasan Agung village, especially the target groups, so those people acknowledge the process of capital loaning business from BAZNAS.

Keywords: *Poverty, BAZNAS, and Regional Government*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
Am KEPALA
UPT/PS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Husnata, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

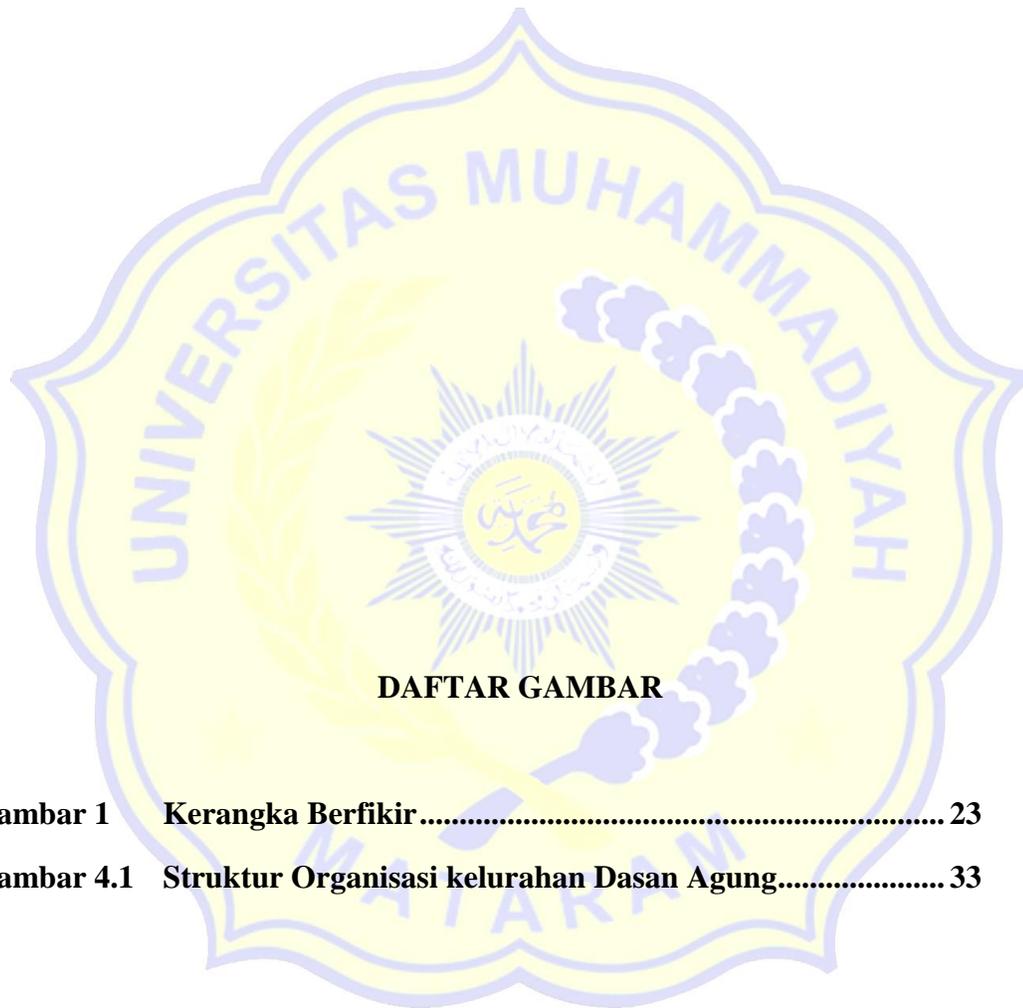
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	11

A. Kemiskinan	11
a. Pengertian dan Jenis Kemiskinan	11
b. Dimensi dan Klasifikasi Kemiskinan	12
B. Ciri-Ciri Kemiskinan	13
C. Peran Baznas dalam Menangani Kemiskinan.....	14
D. Masyarakat.....	17
E. Pemerintah Daerah.....	19
a. Alasan dan Tujuan Pemerintah Daerah	19
b. Pengertian Pemerintah Daerah	21
F. Kerangka berfikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24
3.3 Penentuan Informan/Narasumber	24
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Teknik Analisis Data	26
3.7 Keabsahan Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Dasan Agung	29
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kelurahan Dasan Agung	29
4.2 Hasil Dan Pembahasan.....	34
4.2.1 Kemiskinan.....	34
4.2.2 Bantuan Baznas Dalam Memberantas Kemiskinan Dasan Agung	39
BAB V	46
5.1 kesimpulan.....	46
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Angka kemiskinan Mataram	3
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu.....	7
Tabel 4.1	Kondisi Ekonomi Dasan Agung.....	33
Tabel 4.2.1	Data Pedangan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram 2018	36
Tabel 4.2.1 a	Jumlah Bangunan tak Layak Huni	38
Tabel 4.2.1 b	Daftar jumlah penerima bantuan dari kelurahan Dasan agung	38
Tabel 4.2.2	Dana bantuan non riba Dasan agung Tahun 2018-2019	40
Tabel 4.2.2 a	Verifikasi Kebutuhan usaha dagang kios	42
Tabel 4.2.2 b	Verifikasi Modal Usaha Distro Dasan Agung 2019	43
Tabel 4.2.2 c	jumlah penerima bantuan BAZNAS yang berhasil dan tidak berhasil.....	44



Gambar 1	Kerangka Berfikir.....	23
Gambar 4.1	Struktur Organisasi kelurahan Dasan Agung.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kemiskinan masyarakat merupakan permasalahan penting yang menjadi kebutuhan dasar seorang warga negara Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu masalah fenomenal yang menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas. Pemerintah Kota Mataram telah berupaya mengurangi dan menangani masalah kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat melalui berbagai program. Akan tetapi, segala upaya yang telah dilakukan tersebut masih belum berhasil menurunkan banyaknya keluarga miskin secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data hasil survey tahun 2015 yang menunjukkan bahwa prosentase jumlah penduduk miskin cenderung fluktuatif.

Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang merupakan salah satu dari 50 (lima puluh) dari Kota Mataram, yang berjarak dari ± 1 Km dari pusat pemerintahan Kota Mataram. Awal mula terbentuknya Kelurahan Dasan Agung pada Tahun 1980 yang terdiri 15 Lingkungan dengan keragaman etnis dan suku. Pada Tahun 2007 terjadi pemekaran kecamatan dan kelurahan berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 yang membagi Kelurahan Dasan Agung menjadi 2 (dua) Kelurahan.

Seiring berjalannya waktu dan pertimbangan kepadatan penduduk pada salah satu Wilayah Lingkungan maka pada tahun 2010 kembali terjadi pemekaran

Lingkungan yang awalnya 12 Lingkungan menjadi 13 Lingkungan sampai dengan sekarang.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik sebagai salah satu fungsi penting pemerintah, kecamatan selaparang telah berupaya membenahi kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip “Good Governance”. Sebagai langkah awal, Kecamatan selaparang telah berupaya meningkatkan kinerja aparat dengan mereformasi pola berpikir (mindset) aparatur untuk senantiasa berfokus pada tugas pokoknya, yaitu memberikan pelayanan masyarakat secara profesional. Pembenahan pola pikir aparatur tersebut juga disertai dengan pembenahan sistem manajemen pemerintahan yang salah satunya adalah sistem pelayanan publik, seperti pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk memberikan pelayanan di bidang perijinan. Namun demikian hingga saat ini Pemerintah Kota Mataram merasa masih belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Oleh karena itu di masa yang akan datang perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus (continuous improvement), baik menyangkut sistem maupun SDM.

Dari data tersebut, tercatat bahwa data kepala keluarga miskin di Kota mataram dari tahun ke tahun tidak stabil.

Tabel 1.1.

Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah angka kemiskinan
Kota mataram	Selaparang	Dasan agung baru	328
		Gomong	565
		Dasan agung	2,873
		Mataram barat	342
		Monjok barat	652
		Karang baru	1,439
		Rembige	1,779
		Monjok timur	366
		Monjok	2,056

Sumber: <https://ntb.bps.go.id/statictable/2016/12/15/164/jumlah-individu-dengan-kondisi-kesejahteraan-sampai-dengan-10-terendah-menurut-desa-di-provinsi-nusa-tenggara-barat-2015.html>

Keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat lepas dari peran serta pihak swasta dan dunia usaha. Partisipasi dan peran aktif yang dilakukan sesuai dengan porsinya tidak hanya menghidupkan roda perekonomian saja, namun juga pembangunan daerah secara menyeluruh. Di sisi lain terdapat beberapa hal yang dianggap menghambat peran swasta dan dunia usaha dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah proses perijinan yang dirasa berbelit-belit, mahal, dan lamban. Persepsi tersebut sebenarnya tidak semua benar, karena proses perijinan diperlukan bukan hanya sebagai sumber pendapatan dan pengendalian, tetapi juga pembinaan terhadap dunia usaha itu sendiri. Dengan demikian pemerintah Kecamatan selaparang perlu memberikan penyadaran kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa penataan dalam pemanfaatan aset kelurahan Dasan Agung menjadi sangat penting.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan otonomi daerah ini, maka dalam pemerintahan daerah di Indonesia dikenal adanya daerah otonom. Daerah otonom merupakan satuan pemerintahan di daerah yang menerima desentralisasi teritorial dari pemerintah pusat untuk mengurus

dan mengatur urusannya sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya.

Daerah otonom tersebut adalah daerah kabupaten dan daerah kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian batasan masalah, dapat dikemukakan fokus pembahasan penelitian ini yaitu upaya penanganan kemiskinan masyarakat di Kecamatan Selarang tahun 2015. Sehingga dari pokok permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa fokus masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah kota Mataram dalam menangani permasalahan kemiskinan di kelurahan dasan agung?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penanganan permasalahan kemiskinan di kelurahan dasan agung?

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian penanganan kemiskinan serta keamanan masyarakat di kecamatan selarang, antara lain:

1. Mengetahui upaya Pemerintah Kota Mataram dalam menangani permasalahan kemiskinan di kelurahan Dasan Agung
2. Mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat kemiskinan di kelurahan Dasan Agung.

1.3.2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan-pembahasan mengenai kebijakan upaya penanganan kemiskinan masyarakat. Selanjutnya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai upaya penanganan kemiskinan masyarakat di desa agung .

b. Bagi Universitas

Menambah koleksi sumber bacaan yang berkaitan dengan upaya penanganan kemiskinan masyarakat desa agung.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan . selain itu, jenis penelitian dan metode penelitian dan temuan serta kesimpulan dari penelitian terdahulu dapat di gunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan. . Dengan demikian dapat dengan mudah bagi peneliti untuk menemukan posisi penelitian tentang upaya pemerintah kota mataram dalam menangani kemiskinan dan keamanan di kelurahan Dasan Agung.

Tabel 2.1

No	Judul	Peneliti	Kesimpulan
1	UPAYA PENANGANAN KEMISKINAN SERTA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SLEMAN (Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan	HARTANTI WIDAYANI	1. Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan wadah kegiatan dari sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri atas berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari

	<p>Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman)</p>	<p>Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus. Keluarga yang menjadi anggota tersebut adalah akseptor KB, PUS yang belum ber KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif (UEP). Pemberian bantuan modal usaha Kelompok UPPKS adalah salah satu kegiatan pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dalam rangka mendukung Program Keluarga Berencana Nasional.</p> <p>2. Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban</p>
--	---	---

			<p>Program kerja sama keamanan dan ketertiban bertujuan untuk mewujudkan dukungan kerja sama dari dalam maupun luar negeri</p> <p>dalam rangka pemeliharaan keamanan. Program ini merupakan usaha memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan, dan pelatihan</p> <p>dengan instansi terkait, seperti bantuan lembaga TNI ke Polri dan kerja sama dengan Pemda/Instansi terkait. Program ini pada tahun 2007 tidak</p>
--	--	--	---

			<p>ada satu kegiatan yang dapat terealisasi, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya tidak dilaksanakan kembali.</p>
2	<p>PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KHILAN DI KOTA PALOPO</p>	SUPRIADI	<p>Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Khilan dapat dikategorisasi secara umum menjadi dua peran yaitu penumbuhan iklim usaha dan penguatan potensi atau daya usaha. Penumbuhan iklim usaha meliputi pendanaan, bantuan sarana & prasarana kepada pelaku Khilan, penyebaran informasi usaha,</p>

		<p>kemudahan dalam perizinan usaha, serta bantuan promosi dagang. Penguatan Potensi atau Daya berupa pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo meskipun belum sepenuhnya maksimal.</p>
--	--	---

2.2. Landasan teori

A. Kemiskinan

Pembahasan dalam kajian teori ini akan diuraikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema penelitian. Sesuai dengan judul “ Upaya Pemerintah Kota Mataram dalam menangani kemiskinan dan keamanan masyarakat di Kelurahan Dasan Agung” maka akan dibahas beberapa konsep mengenai kemiskinan dan keamanan masyarakat, kewenangan pusat dan daerah, pemerintah daerah, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

a. Pengertian dan Jenis Kemiskinan

Kemiskinan menurut Soerjono Soekanto (1995: 406-407) diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial, apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat sosial, apabila perbedaan kedudukan ekonomi para warga masyarakat ditentukan secara tegas.

Menurut Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480kg/kapita/tahun di daerah perkotaan. Di Indonesia, perkiraan tentang ukuran garis kemiskinan ditentukan melalui perhitungann kebutuhan minimum atau kebutuhan dasar. Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung atas dasar jumlah pengeluaran (proksi pendapatan) per kapita menetapkan angka kebutuhan dasar minimum bagi makanan 2100 kalori per hari ditambah dengan pengeluaran minimum untuk kebutuhan pokok lainnya seperti perumahan, pakaian, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan barang tahan lama.

b. Dimensi dan Klasifikasi Kemiskinan

Konsep kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional sehingga konsep kemiskinan tidak mudah untuk dipahami. Menurut Tri Widodo (2006:296), kemiskinan paling tidak memiliki dua dimensi, yaitu:

a. Kemiskinan Sosial

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapat kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata lain, kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

b. Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (resources) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkan dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian financial, dalam hal ini financial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Ciri-ciri Kemiskinan

Problem kemiskinan menurut Soepriyatno (2008:155) adalah masalah kelembagaan. Masalah struktural yang melingkupi masyarakat miskin antara lain

ketidakadilan penguasaan alat produksi terutama tanah, kualitas sumber daya manusia, subsidi, akses memperoleh kredit, dan ketiadaan pasar. Sedangkan ciri-ciri kemiskinan menurut Munandar Soelaeman (1993:175), antara lain:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah, modal, ketrampilan, dan sebagainya;
- b. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha;
- c. Tingkat pendidikan rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan;
- d. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas, berusaha apa saja;
- e. Banyak yang hidup di kota berusia muda dan tidak mempunyai ketrampilan.

C. Peran baznas dalam menangani kemiskinan

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia di akibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi saat ini yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi penyebabnya sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga inter mediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang unbankable, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahnya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya.

Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0,3 % mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana Jamal (2004) mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila

pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada 2011 potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB. Potensi zakat nasional ini diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu Pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua ini adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional.

Potensi zakat yang mencapai Rp 217 triliun pertahun merupakan tantangan bagi Badan amil zakat dalam memaksimalkan kinerjanya sehingga dana zakat tersebut dapat bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan yang menjadi parameter golongan mustahik. Adanya program zakat produktif menjadi salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan, dengan mengubah mustahik menjadi muzaki dalam jangka waktu tertentu. Dipilihnya BAZNAS sebagai obyek dalam penelitian ini karena BAZNAS merupakan representasi Organisasi pengelola zakat (OPZ) pemerintah dan merupakan OPZ yang terbesar di Indonesia.

Agar pendapatan mustahik meningkat diperlukan upaya kecermatan dalam memilih mustahik dengan harapan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan

berwirausaha dengan menghindari tingkat pengembalian modal usaha yang macet, yang kemudian dana tersebut akan digulirkan kepada mustahik lain. Disamping itu, agar efektif dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dimana dana yang ada dialokasikan kepada mustahik dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi dan kemampuannya dalam penggunaan dana. *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015):93-104

D. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society yang berarti kawan, sedangkan dalam bahasa Arab yaitu syirk, artinya bergaul. MacIver, J.L. Gillin, dan J.P. Gillin dalam Munandar Soelaeman (1993:63) sepakat bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Soerjono Soekanto (1995:162), istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat.

Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat tersebut. Ciri-ciri pokok suatu masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu

yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan merupakan suatu sistem hidup bersama.

Sedangkan Abdul Syani (Basrowi, 2005:40-41) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri. Manusia diikat dalam kehidupan kelompok karena rasa sosial yang serta merta dan kebutuhannya. Masyarakat ditandai oleh ciri-ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, dan adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

b. Unsur-unsur Masyarakat

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain (Abdul Syani dalam Basrowi, 2005:42):

- 1) Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relative lama, di dalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa serta mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dari hidup bersama itu. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat tersebut;
- 2) Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan;
- 3) Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing masing terikat dengan kelompoknya.

c. Faktor Pendorong Masyarakat

Menurut Hassan Shadily dalam bukunya Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia, bahwa manusia akan tertarik kepada hidup bersama dalam masyarakat karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu (Basrowi, 2005:42-43):

- 1) Hasrat yang berdasar naluri (kehendak biologis yang di luar penguasaan akal) untuk mencari tema hidup, pertama untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sifatnya biologis sebagaimana terdapat pada semua makhluk hidup. Dari sifat manusia yang biologis itu kemudian mendorongnya untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Kebutuhan ini sebagai manusia yang beradab dan beragama biasanya dipenuhi dengan syarat-syarat perkawinan secara sah.
- 2) Kelemahan manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang berserikat dengan orang lain sehingga dapat berlindung bersama-sama dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dengan usaha bersama. Keadaan demikian ini juga akhirnya mendorong setiap individu (manusia) untuk tidak terlepas hidup bermasyarakat.

E. Pemerintah Daerah

A. Alasan dan Tujuan Pemerintahan Daerah

Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintahan daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Hanif Nurcholis, 2007:39-43):

- a. Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik, dan budaya; Kondisi alamiah menjadi fakta politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya mempengaruhi lembaga-lembaga formal yang dibentuk negara.
- b. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; Sistem pemerintahan daerah memberi pemecahan atas persoalan pelayanan birokrasi yang kompleks, panjang, dan berbelit-belit.
- c. Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien;

Hal-hal yang membuat sistem pemerintahan daerah lebih efisien adalah:

1. Dilihat dari kuantitasnya, urusan yang diselenggarakan pemerintah daerah lebih sedikit daripada yang diselenggarakan pemerintah pusat;
2. Dilihat dari rumitnya birokrasi, pemerintahan daerah lebih sederhana daripada diselenggarakan secara terpusat;
3. Dilihat dari pemberian pelayanan publik, pemerintahan daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah, murah, dan cepat;
4. Dilihat dari cara menyelesaikan masalah, pemerintah daerah lebih cepat menyelesaikannya.

Adapun tujuan dibentuknya pemerintahan daerah adalah:

1. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan yang terlalu besar mengenai masalah-masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh masyarakat setempat;
2. Mendidik masyarakat untuk mengurus urusannya sendiri;

3. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan;
4. Memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam pasal 18, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penjelasan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa karena Negara Indonesia itu adalah suatu Negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk Negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang (Kansil: 2004:2-3).

F. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Hanif Nurcholis (2007:24) konsep local government berasal dari Barat untuk itu, konsep ini harus dipahami sebagaimana orang Barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein (2002:3) menjelaskan bahwa local government dapat mengandung tiga arti, yaitu pemerintah lokal, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal, dan daerah otonom.

Sedangkan yang dimaksud pemerintah daerah (Pasal 1 angka 3) adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure

penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai pelaksana kebijakan pemerintahan daerah maka dalam setiap daerah terdapat birokrasi lokal. Birokrasi lokal merupakan wujud kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah. Birokrasi merupakan suatu organisasi yang merujuk pada hubungan rasional dalam mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan birokrasi lokal menurut Hanif Nurcholis (2007:37), yaitu: Birokrasi lokal yaitu organisasi pemerintahan daerah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan negara pada lingkup daerah. Birokrasi lokal terdiri atas kepala daerah beserta aparaturnya. Pada daerah provinsi berarti gubernur dan aparaturnya: sekretaris daerah dan bawahannya, kepala biro dan bawahannya, kepala dinas dan bawahannya, kepala kantor dan bawahannya, kepala badan dan bawahannya, direktur BUMD dan bawahannya. Pada daerah kabupaten dan kota berarti bupati/walikota dan aparaturnya: sekretaris daerah dan bawahannya, kepala dinas dan bawahannya, kepala kantor dan bawahannya, kepala badan dan bawahannya, camat dan bawahannya, lurah dan bawahannya, dan direktur BUMD dan bawahannya. Semua aparatur pemerintah daerah di luar kepala daerah yang duduk dalam birokrasi disebut birokrat lokal.

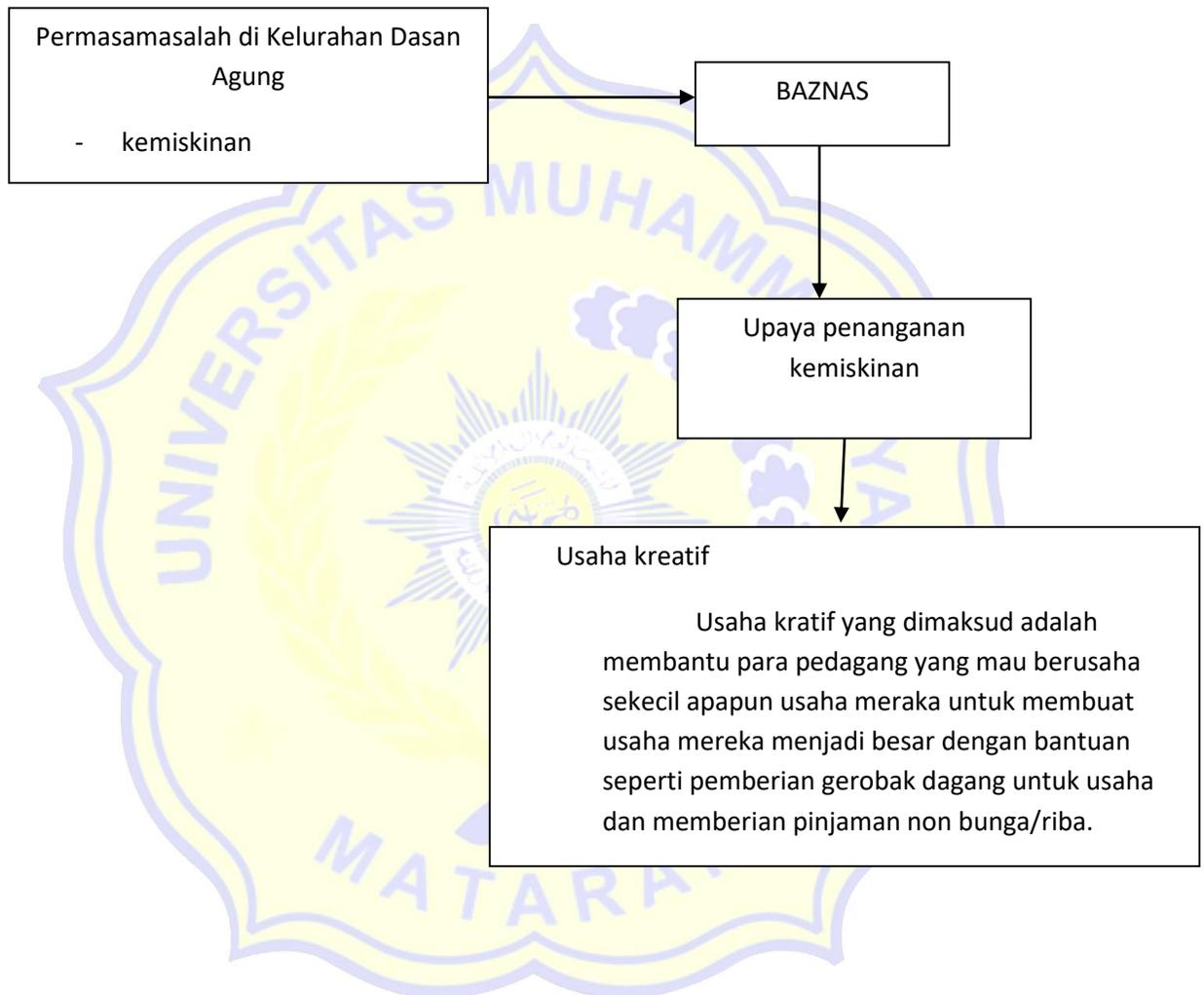
Birokrasi menurut Budi Winarno (2008:202-203) merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Ripley dan Franklin, mengidentifikasi enam karakteristik

birokrasi, yakni birokrasi di manapun berada, merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda, fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks, birokrasi jarang mati, dan birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan mereka. Dengan merujuk pada peran yang dijalankan birokrasi tersebut, maka mengetahui struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental dalam mengkaji implementasi kebijakan.



G. Kerangka Berfikir

Gambar 1
Gambar kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2005:4) Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data – data yang dikumpulkan berupa kata – kata gambar – gambar dan bukan angka. Data – data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi dan lainnya.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Waktu penelitian ini pada bulan Januari 2020 dengan waktu penelitian 2 minggu.

3.3. Penentuan Informasi/Narasumber

Sasaran atau objek penelitian ini yaitu di Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian tersebut. subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung

di dalam penelitian ini. Adapun klarifikasi informan penelitian ini yakni Ketua BAZNAS, Kepala Lurah Kelurahan Dasan Agung dan Masyarakat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer yaitu data terpenting dalam penelitian yang akan diteliti. Data primer adalah data yang akan diperoleh langsung dari sumbernya. Dengan data primer ini nantinya sangat membantu peneliti untuk mendapatkan data – data yang di teliti melalui wawancara dan jawaban dari daftar pertanyaan yang akan diajukan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya, tetapi yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, jurnal ilmiah dan dokumen – dokumen dari pihak yang akan diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengumpulan data dengan Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang

perilaku informan dan yang lainnya, seperti dalam keadaan yang semestinya. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang – orang yang terlibat di dalamnya

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dengan wawancara ini nantinya peneliti akan mendapat data – data melalui sistem tanya jawab. Peneliti disini melakukan wawancara langsung kepada Kepala Lurah, Ketua Baznas serta Masyarakat di sekitar Kelurahan Dasan Agung Kota Mataram .

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dipeoleh dengan menggunakan catatan – catatan tertulis yang ada dilokasi penelitian, serta sumber – sumber lain yang menyangkut masalah yang diteliti. Melalui Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini seperti catatan profil desa.

3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif ini adalah analisis terhadap informasi yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta – fakta data yang diperoleh dilapangan. Adapun teknik analisis data dalam tiga tahapan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema. Membuat gugus – gugus, menulis memo dengan maksud menyisihkan data\informasi yang tidak relevan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap Pengambilan kesimpulan peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen urain

diklasifikasi kembali dengan informan. Apabila hasil klasifikasi memperkuat simpulan atas data yang valid, maka pengumpulan data siap dihentikan.

3.7 Keabsahan Data

Dalam mendapatkan keabsahan data, maka dalam penelitian dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data terlebih dahulu. Moleong (2011: 330) menjelaskan bahwa keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk mengecek dan membandingkan data tersebut.

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Sugiyono (2015: 373) menjelaskan bahwa triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.